



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR 060/ 45 /KEP-OR/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG**  
**TAHUN 2017-2021**



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## **SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Muda Nomor 230, Telp. (0565) 21004-21007, Faks (0565) 21003  
SINTANG 78611

---

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR : 060/ 45 /KEP-OR/2020**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021**

#### **SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang
- a. bahwa penyusunan indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 106 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk menetapkan rencana kerja anggaran dan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA ...

- KETIGA** : Setiap Bagian di Sekretariat Daerah wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai indikator kinerja utama dilakukan oleh setiap Kepala Bagian dan wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah setiap akhir tahun melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Nomor 060/28/KEP-ORTAL/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 3 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**YOSEPHA HASNAH**

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang (sebagai laporan)  
2. Ketua DPRD Kabupaten Sintang di Sintang  
3. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang  
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 060/ 45 /KEP-OR/2020  
TANGGAL : 3 Februari 2020  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

1. Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara dan instansi daerah;
  - e. perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pemerintahan di daerah dan penyusunan anggaran;
  - g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga perangkat daerah dengan instansi vertikal;
  - h. pembinaan penyelenggaraan pengawasan dan pengembangan Otonomi daerah;
  - i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Sekretariat Daerah;
  - j. evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - k. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Sekretariat Daerah;
  - l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Sekretariat;
  - m. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
  - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi ...

4. Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021
5. Misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 :
- Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
  - Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
  - Misi 3 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
  - Misi 4 : Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
  - Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sintang yang terkait dengan tujuan, sasaran, rencana strategis dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah misi yang ke **6 (enam)**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2016-2021**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, penataan daerah/wilayah, peningkatan sarana dan prasarana fisik pemerintah kecamatan.	Tingkat persiapan, kesiapan dan kelayakan pembentukan kecamatan baru	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mempersiapkan pembentukan kecamatan baru	Peraturan Perundang-undangan terkait pemekaran kecamatan, dan Laporan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan
		Tingkat kejelasan dan kepastian batas daerah Kabupaten Sintang	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menetapkan kejelasan dan kepastian batas daerah kabupaten	Peraturan Perundang-undangan terkait kewilayahan, Laporan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan
		Tingkat kejelasan dan kepastian batas kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menetapkan kepastian batas kecamatan	Peraturan Perundang-undangan terkait kewilayahan, Laporan kegiatan Bagian Tata Pemerintahan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
2.	Terlaksananya pembinaan bidang kesejahteraan masyarakat dan umat beragama serta terlaksananya pemberian bantuan sosial dan bantuan bidang keagamaan.	Tingkat pengetahuan keterampilan penerima bantuan dalam penyusunan SPJ	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pengetahuan penerima bantuan	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat kelancaran penyelenggaraan ibadah haji kabupaten Sintang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelayanan pelaksanaan ibadah haji	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Persentase usaha kesehatan sekolah yang aktif	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah bantuan sosial/keagamaan, kesmas, bantuan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat kerukunan umat beragama	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kerukunan umat beragama	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat Ketersediaan data dan informasi penerima bantuan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi penerima bantuan	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Evaluasi mahasiswa ikatan dinas	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi atas mahasiswa ikatan dinas	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Tingkat penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerimaan bakal calon mahasiswa baru jalur kerjasama dan jalur beasiswa	Laporan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat
3.	Terciptanya perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum serta dokumentasi hukum melalui penyusunan produk hukum, sosialisasi produk hukum dan pengkajian perundang-undangan.	Persentase Raperda yang telah di Perdakan	Bagian Hukum dan HAM	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah	Peraturan Perundang-undangan, Laporan kegiatan Bagian Hukum dan HAM
		Tingkat penyelesaian kasus/perkara yang ditangani sampai dengan tuntas	Bagian Hukum dan HAM	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan kasus/perkara yang dihadapi oleh pemerintah daerah	Peraturan Perundang-undangan, Laporan kegiatan Bagian Hukum dan HAM
		Jumlah Perda yang telah disosialisasikan	Bagian Hukum dan HAM	Mengukur hasil Perda yang disosialisasikan dalam waktu satu tahun	Laporan kegiatan Bagian Hukum dan HAM
		Tingkat kelengkapan buku dan peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan, dipelihara dan dikelola	Bagian Hukum dan HAM	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan, pemeliharaan dan pengelolaan buku peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan	Laporan kegiatan Bagian Hukum dan HAM

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
4.	Tersusunnya juknis pembinaan dan pelaksanaan operasional bidang perekonomian dan pembangunan untuk kelancaran pembinaan dan proses administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan perekonomian	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi kegiatan perekonomian	Laporan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Tingkat ketersediaan data dan informasi laporan kegiatan pembangunan		Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi kegiatan pembangunan	Laporan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan	
Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan perekonomian sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya		Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan perekonomian tahun berikutnya	Laporan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan	
Tingkat pemanfaatan data dan informasi kegiatan pembangunan sebagai bahan evaluasi, acuan perbaikan kinerja dan penetapan kebijakan pembangunan tahun berikutnya		Bagian Perekonomian dan Pembangunan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan pembangunan tahun berikutnya	Laporan kegiatan Bagian Perekonomian dan Pembangunan	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
5.	Tersusunnya bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, strategi, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang/jasa dan penyelesaian sengketa lelang di Kabupaten Sintang dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Persentase penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa pemerintah kepada OPD Kabupaten Sintang	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyebarluasan bahan SOP dan SPM pengadaan barang/jasa	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase ketersediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga ahli pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan proses pengadaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Persentase unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengukur unit kerja yang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa Pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas penyelesaian sengketa	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil lelang pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi penyelesaian sengketa lelang	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang dientri dalam SIRUP	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengukur pengentrian pengadaan barang/jasa pemerintah dalam SIRUP	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah dalam SIRUP yang diumumkan	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam mengukur mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam SIRUP	Laporan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
6.	Tersusunnya perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air.	Jumlah dokumen profil daerah tentang sumber daya alam	Bagian Sumber Daya Alam	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dokumen Profil Daerah tentang pembangunan daerah tertinggal	Laporan Kegiatan Bagian Sumber Daya Alam
		Jumlah dokumen kebijakan daerah di bidang sumber daya alam	Bagian Sumber Daya Alam	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan dokumen Pra Study Kelayakan Potensi Sumber Daya Energi	Laporan Kegiatan Bagian Sumber Daya Alam
7.	Terlaksananya pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian yang tertib dan lancar, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pelayanan administrasi dan operasional.	Tingkat kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor milik pemerintah daerah	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor milik pemerintah	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor milik pemerintah daerah	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap bagian di lingkungan Setda	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat kelayakan Sarana dan Prasarana Bagian di Lingkungan Setda	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kantor atas barang dan jasa	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan kantor atas barang dan jasa	Laporan kegiatan Bagian Umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesejahteraan pegawai	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelayanan kesejahteraan pegawai	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan ketatausahaan	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelayanan ketatausahaan	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan disiplin pegawai	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penerapan disiplin pegawai	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Indeks kepuasan pegawai terhadap penghargaan dan prestasi kerja	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah terhadap penghargaan dan prestasi kerja	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan tugas pokok Setda dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap perencanaan	Laporan kegiatan Bagian Umum
		Tingkat kepuasan pelayanan kedinasan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan kegiatan Bagian Umum

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
8.	Tersusunnya dan terselenggaranya kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah rancangan Perda Perangkat Daerah dan Perbup SOTK perangkat daerah	Bagian Organisasi	Mengukur jumlah rancangan perda dan perbub dalam penyusunan dan evaluasi tugas pokok dan fungsi OPD	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur jumlah analisis jabatan perangkat daerah yang disusun	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Jumlah standar kompetensi jabatan yang disusun	Bagian Organisasi	Mengukur jumlah dokumen standar kompetensi jabatan yang disusun.	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Persentase pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik.	Bagian Organisasi	Mengukur efektifitas kinerja sekretariat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Persentase fasilitasi implementasi ketatalaksanaan	Bagian Organisasi	Mengukur efektifitas kinerja sekretariat daerah dalam memfasilitasi ketatalaksanaan	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Persentase penguatan SAKIP Kabupaten	Bagian Organisasi	Mengukur efektivitas sekretariat daerah dalam penguatan SAKIP Kabupaten	Laporan Kegiatan Bagian Ortal
		Persentase Pembinaan percepatan reformasi birokrasi	Bagian Organisasi	Mengukur efektivitas pemerintah kabupaten dalam pembinaan percepatan reformasi birokrasi	Laporan Kegiatan Bagian Ortal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
9.	Terwujudnya sistem pendokumentasian terpadu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta terwujudnya pelayanan kehumasan dan protokol yang tepat, cepat dan akurat.	Persentase jumlah informasi atau kegiatan yang diliput atau diberitakan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan informasi peliputan dan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat	Laporan kegiatan Bagian Humas dan Protokol
		Persentase jumlah informasi dan kegiatan pelayanan dan pembangunan yang telah diinformasikan kepada masyarakat	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Mengukur efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan informasi peliputan dan pemberitaan kegiatan pelayanan dan pembangunan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat	Laporan kegiatan Bagian Humas dan Protokol
10.	Optimalisasi penyusunan program, rencana kerja anggaran dan pelaporan serta pelayanan administrasi keuangan yang lancar.	Jumlah laporan keuangan Sekretariat Daerah yang disusun	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen rencana kerja Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah Laporan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan dan pencapaian kinerja dan anggaran Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan laporan semesteran dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Alasan</b>	<b>Sumber Data</b>
1	2	3	4	5	6
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan laporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen anggaran Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan dokumen anggaran Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur efektivitas kinerja Sekretariat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah surat keputusan pendukung	Bagian Program dan Keuangan	Mengukur jumlah surat keputusan pendukung yang dihasilkan	Laporan Kegiatan Bagian Program dan Keuangan

**SEKRETARIS DAERAH,**

**TTD**

**YOSEPHA HASNAH**